

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ASNAN ASY'ARI
11724101007

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M / 1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasaah Dusturiyah”, yang ditulis oleh :

NAMA : ASNAN ASY'ARI
 NIM : 11724101007
 PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
 (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

h. Yauw

HENDRI SAYUTI, M.Ag



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAN SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ASNAN ASY'ARI
NIM : 11724101007
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Abmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Asnan Asy'ari (2021) : “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

Penelitian ini ialah mengkaji tentang pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif siyasah dusturiyah. Adapun masalahnya, bagaimana pemilu proporsional terbuka tersebut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pemilu proporsional terbuka di dalam perspektif fiqih siyasah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pemilu Proporsional terbuka juga dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya secara eksplisit ditegaskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 pada huruf (f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b) bahwa prinsip pemilu di Indonesia ialah terbuka dan proporsional.

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*), melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang didapat dari buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Di analisis dengan teknik konten analisis. Sedangkan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun literatur dari buku, jurnal, skripsi dan hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu, di dalam perspektif siyasah dusturiyah. Memilih wakil rakyat di zaman para sahabat ialah berdasarkan hasil musyawarah untuk menunjuk beberapa orang yang dipercaya dalam mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada imam atau pemimpin pada masa tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah banyak memberi kita nikmat dan hidayah-Nya. Terutama nikmat ilmu, kesehatan dan kesempatan. Sehingga atas izin-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** ini dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan sekalian alam, nabi Muhammad SAW. semoga di akhirat kelak kita termasuk orang-orang diberi syafaat oleh beliau. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin*,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menyadari kekurangan disana-sini. Sebab, penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan penulis di masa yang akan datang. Penulis juga menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segara kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda A. Rasul. Br dan Ibunda Salmiah yang senantiasa selalu mendo’akan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberi restu dan mengharapkan keberhasilan penulis. Juga memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Juga, terimakasih kepada abang-abang penulis Masri Syukur, S.Pd.I dan Armi Sabri, S.Psi beserta kedua kakak ipar penulis Rumina, S.Pd.i dan Rita, S.Pd dan juga sekaligus kepada keluarga besar yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.
7. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaatnya kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan juga seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Terimakasih juga kepada kepada Bapak/Ibu Dosen Pengelola Perpustakaan UIN SUSKA Riau atas ilmunya dan peminjaman buku sebagai referensi penulis.

9. Serta terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum umunya, dan terkhusus teman-teman di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior serta semua teman-teman penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis yakin masih banyak dari pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Semoga semua kebaikan yang telah penulis dapatkan menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik, di dunia maupun di akhirat. *Aamin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Akhir kata kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan berserah diri dan kepada pembaca dari segala kalangan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Literatur	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	17
B. Undang-Undang Pemilu di Indonesia	20
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	20
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	22
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.....	25
C. Isi Pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	26
BAB III KERANGKA TEORI	
A. Pemilu Proporsional Terbuka.....	28
1. Pengertian Pemilu Secara Teori	28
2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli	28
3. Pengertian Pemilu Proporsional Terbuka.....	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Pemilu	36
5. Fungsi Pemilu.....	38
B. Siyasah Dusturiyah.....	39
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	39
2. Pengertian Siyasah Dusturiyah	41
3. Pengertian <i>Syura</i> '	43
4. Pengertian <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	46
1. Mekanisme Pemilu Proporsional Terbuka.....	46
2. Pemilu dan Wakil Rakyat yang Ideal	48
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.....	50
B. Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah	51
1. <i>Syura</i>	52
2. <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan.¹ Jadi, sistem proporsional ialah sistem kursi-kursi di parlemen yang tersedia dibagikan ke tiap-tiap partai politik sesuai dengan banyak perolehan suara yang diperoleh partai politik tersebut.

Sistem proporsional (*proportionate representative*) diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional representatif terdiri dari dua macam, yaitu *list* yaitu berdasarkan daftar; dan *single tranferable votes* yaitu berdasarkan peringkat. Umumnya sistem proporsional daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan.

Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut,² dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. ke-9, hlm. 416

² Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika* Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 20

³ Sri Emut Ratnasara, *Skripsi, Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pola daftar terbuka, calon adalah yang utama atau *candidate centered*. Hal ini membuat calon dari partai yang sama harus bersaing untuk mendapatkan suara. Tentunya hal ini berpotensi untuk melahirkan konflik internal partai dan juga keadaan antar calon yang fragmentasi.⁴

Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012., yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.⁵

Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen.⁶ Jadi, ketika pemilihan berlangsung rakyat tahu betul siapa wakil yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut dan siapa yang dia rasa pantas dalam mewakili suaranya sebagai rakyat di pemerintahan. Karena dengan sistem proporsional terbuka rakyat bisa melihat langsung wajah dan nama calon yang akan dipilihnya. Jadi rakyat bisa memilih dengan pilihan hati nuraninya siapa yang akan dia pilih dan rasa cocok untuk menjabat di pemerintahan mewakili suara rakyat.

⁴Diah Ayu Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 20

⁵ Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁶ Diah Ayu Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan umum adalah salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.⁷ Oleh karena itu, maka dengan diberlakukan sistem proporsional terbuka tersebut, rakyat lebih tahu seperti apa orang-orang yang akan menjadi kandidat wakil mereka di pemerintahan, karena mereka tidak hanya memilih untuk partai tetapi kandidat yang juga diusung oleh setiap partai.

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 disebutkan bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”⁸ Jadi, menurut UU No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu daftar terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka,

⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), cet. ke-4, hlm. 329

⁸ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai.

Lalu, di dalam Bab II Pasal 3 huruf (f) dan (g) dinyatakan bahwa Pemilu harus bersifat terbuka dan proporsional.⁹ Jadi, telah dijelaskan memang di dalam UU No. 7 Tahun 2017 bahwa Pemilu tersebut harus dilakukan dengan terbuka dan proporsional. Jadi, setiap anggota partai dalam tiap-tiap partai bisa mengajukan diri sebagai kandidat dari partai tersebut walau mungkin harus terjadi persaingan diantara sesama anggota partai.

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat *al-Nuqaba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiaat Nabi SAW. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi SAW. bersabda:

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِفُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرٌ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.

Artinya:

“Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barangsiapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu ia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya.

⁹ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, Allah menyiksanya. Dan jika menghendaki, Allah akan mengampuninya.” Lalu kami pun berbaiat kepada beliau.” (HR. Bukhari, no. 18 dan Muslim, no. 1709).¹⁰

Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi SAW. agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang. Nabipun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa saja yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kami tunjuk.¹¹

Dari dua kisah tersebutlah maka para ulama-ulama menjadikan dasar mengenai persoalan pemilihan umum, karena dari dua kisah tersebut mempunyai makna tentang rakyat yang memberikan pilihannya kepada wakil yang mewakili mereka.

Di dalam fiqh siyasah terdapat istilah *ahlul halli wal ‘aqdi* yaitu orang yang berhak melepas dan mengikat. Maksudnya ialah orang yang berhak memutuskan dan membatalkan sesuatu. Dalam hal ini *ahlul halli wal ‘aqdi* yang dimaksud adalah para pemimpin di dalam sebuah pemerintahan. Dengan

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, “Faedah Sirah Nabawiyah: Bai’at Aqabah Pertama”, artikel dari <https://rumaysho.com/20900-faedah-sirah-nabi-baiat-aqabah-pertama.html>. Diakses pada 19 Juli 2019

¹¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Harumnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2014), cet. ke-1, hlm. 304-305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

demikian sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan (*waliyyul amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang di dapati untuk menyandang tugas itu.¹²

Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman. Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *ahlul halli wal 'aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin.¹³

Jadi, dari zaman pemerintahan Islam yang dahulu sistem pemerintahan tetap rakyatlah yang berhak mengatur dan mempunyai kekuasaan dalam memilih pemimpin, tetapi *ahlul halli wal 'aqdi* atau wakil rakyat di pemerintahan yang tetap mewakili rakyat untuk menyampaikan suara mereka.¹⁴

Islam tidak membuat suatu sistem khusus tentang pemilihan di dalam Islam begitu juga dengan hukum-hukumnya. Tujuan tidak lain ialah supaya rakyat ikut andil dalam perkara bermusyawarah. Karena jika Rasulullah saw. menetapkan musyawarah menjadi suatu sistem maka rakyat akan

¹² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm. 3

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Ragrafindo Persada, 1994), cet. ke-1, hlm. 79

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menganggapnya sebagai suatu perkara agama dan akan diterapkan terus di setiap masa. Bisa jadi nanti di suatu masa atau daerah tidak cocok dengan sistem tersebut namun tetap dijalankan sehingga membuat daerah tersebut menjadi tidak teratur dan seimbang.

Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasannya tidak dibuat sebagai rahmat untuk manusia bukan karena lupa. Memberikan keleluasan kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan undang-undang yang adil, yang menyatukan rakyat bukan menceritakannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.¹⁵

Jadi sistem pemerintahan dalam Islam tersebut tidaklah ditetapkan dengan penuh oleh rasulullah saw. karena rakyat bisa menganggap itu menjadi sebuah agama. Namun rasulullah saw. memberikan gambaran bagaimana cara sistem sebuah pemerintahan tersebut seperti bagaimana dalam dua kisah yang dijelaskan di atas tadi tentang Baiat *al-nuqaba'* (wakil-wakil suku) dan juga kisah tentang utusan Hawzan.

Di dalam al-Qur'an surah asy-syura ayat 38 Allah swt. menjelaskan untuk mengambil sebuah keputusan dengan bermusyawarah. Allah swt. berfirman:

¹⁵ Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. ke-1 hlm. 72-73

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy-Syura[42]: 38)¹⁶

Jadi, di dalam al-Qur'an pun Allah menjelaskan untuk memutuskan suatu perkara itu dengan bermusyawarah. Atas dasar ayat tersebut juga dapat kita ambil kesimpulan bagaimana untuk setiap mengambil keputusan bahkan untuk dalam sebuah sistem pemerintahanpun sebaiknya di ambil sistem bermusyawarah supaya dapat mengambil satu suara untuk keputusan bersama.

Demikian juga ketika zaman para khalifah-khalifah. Ketika Rasulullah saw. wafat para sahabat kemudian bermusyawarah yang mana di saat musyawarah itu berlangsung Abu Bakar berkata, “Di sini ada Umar dan Ubaidah, apabila tuan-tuan setuju nyatakanlah *bai'at* kepada salah seorang dari mereka.” Umar berkata, “Demi Allah, tuanlah yang harus menjadi kepala Negara, tuanlah muhajirin yang paling utama, dan menggantikan Rasulullah menjadi imam di dalam shalat, sedangkan shalat adalah ibadah yang paling utama, saya mem-*bai'at* tuan.”

Ketika Umar dan Abu Ubaidah akan mem-*bai'at* yang didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem-*bai'at* Abu Bakar. Setelah suku Aus melihat apa yang dilakukan Basyir, maka merekapun mem-*bai'at* Abu Bakar.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Quranidea, 2007), cet. ke-1 hlm. 487

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting.¹⁷

Jadi, sistem yang digunakan di dalam Islam ialah sistem bermusyawarah, dari sejak zaman Rasulullah saw. begitupun juga di zaman para sahabat. Akan tetapi Rasulullah saw. tidak menyebutnya dengan spesifik karena nanti umat bisa menganggap itu sebuah agama. Maka dari karena itu juga Rasulullah saw. tidak memilih siapa calon yang akan menggantinya, supaya umat bisa bermusyawarah dan memilih sendiri siapa yang akan memimpin mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), cet. ke-2, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH". Tentang bagaimana pemilu proporsional terbuka tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga bagaimana pemilu proporsional terbuka tersebut di dalam perspektif siyasah dusturiyah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendekati kepada masalah yang diinginkan. Maka penulis membatasi masalah yang ditulis mengenai pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga pemilu proporsional terbuka dalam perspektif siyasah dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana pemilu proporsional terbuka dalam perspektif siyasah dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemilu proporsional terbuka dalam perspektif siyasah dusturiyah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.
3. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca lainnya.

F. Kerangka Literatur

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian penulis seperti yang dipaparkan di latar belakang masalah, maka penulis mencantumkan beberapa penelusuran berupa beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penulis, yaitu :

1. Sri Emut Ratnasara, judul *“Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”*. Dengan kesimpulan, penerapan sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar dalam kualitas anggota legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka diberlakukan akan menimbulkan banyak calon legislatif yang populer dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas kemampuan para calon legislatif yang akan menduduki jabatan, serta para calon akan berlomba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian, akan kemungkinan memicu terjadinya politik uang.¹⁸

2. Sumhari, judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI”*. Dengan kesimpulannya sistem proporsional terbuka adalah sistem yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena sistem ini memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih secara terbuka dan tidak ada unsur-unsur pemaksaan dari pihak manapun.¹⁹
3. Kharisma Aulia Firdausy, judul *“Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga”*. Dengan kesimpulan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang dilaksanakan di kota Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi, sistem proporsional terbuka terbatas ini belum efektif dan juga bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.²⁰

Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan telah ada penelitian sebelumnya mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan juga pemilu

¹⁸ Sri Emut Ratnasara, *Skripsi, Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁹ Sumhari, *Skripsi, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI*, (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)

²⁰ Kharisma Aulia Firdausy, *Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas pada Pemilu Legislatif di Kota Salatiga*, *Jurnal Res Publica*, Vol. 3, No. 1, 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perspektif siyasah dusturiyah. Namun, tetap berbeda dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,²¹ atau penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, yang relevan dengan kajian sebagai sumber data.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua macam, antara lain:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang ada kaitan langsung dengan tema skripsi ini. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta buku-buku Fiqih Siyasah.
- 2) Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan ialah buku-buku dan juga melalui jurnal-jurnal terkait.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. ke-1, hlm. 3

²² Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), cet. ke-1, hlm. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih tekni dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.²³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan melalui metode sebagai berikut:

- a. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang ada relevansinya dengan pemilihan umum proporsional terbuka.
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku tentang bagaimana harusnya seorang imam dalam kitab-kitab fiqh siyasah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis konten. Menurut Barelson, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kuantitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.²⁴

²³ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), cet. ke-2, hlm. 171

²⁴ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), cet. ke-1, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Analisis konten termasuk kategori penelitian kualitatif. Sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian analisis konten harus memenuhi syarat, yaitu data penelitian berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat tidak terstruktur sehingga tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan atau diubah dalam bentuk numerik atau angka-angka. Contoh data kualitatif tersebut antara lain dokumen kurikulum, buku ajar, karya sastra, surat, dsb.²⁵

Jadi konten analisis ialah kategori penelitian kualitatif yang mana, data kualitatif tersebut tidak bersifat terstruktur dan tidak secara langsung dapat diubah ke dalam bentuk numerik atau angka-angka. Seperti dokumen kurikulum, buku ajar, karya sastra dan masih banyak lagi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini, penulis membagi masing-masing dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Literatur, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dalam bab ini nanti akan menjelaskan bagaimana latar

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belakang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbagai macam Undang-Undang Pemilu di Indonesia dan juga isi pokok dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

BAB III : Kerangka teori, di dalam bab ini akan menjelaskan apa itu pemilu, pemilu proporsional terbuka dan juga akan menjelaskan apa itu siyasah dusturiyah, *syura'* dan juga *ahlul halli wal aqdi*

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi analisa tentang Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V : Kesimpulan dan saran, pada bab ini yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran merupakan harapan dari penulis yang nantinya ini dapat dipergunakan dalam sebuah pemerintahan yang sesuai dengan pemerintahan Islam yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Pemilu secara filosofis adalah dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu sendiri memiliki tujuan untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan Indonesia. Cita-cita nasional ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedua, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai, maka perlu adanya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dikarenakan untuk memilih wakil rakyat dan pemerintah negara, karena pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin adanya cita-cita bangsa maka perlu adanya basis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁶

Jadi, disebabkan dari latar belakang yang ingin mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia dan juga untuk menjamin cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, maka dibuatlah suatu Undang-Undang

²⁶ Kharisma Aulia Firadusy, *op.cit.*, hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pemilu untuk mencari para wakil rakyat yang nantinya akan duduk di pemerintahan untuk mendengarkan dan mewujudkan suara dan cita-cita rakyat.

Pemilu sebagai sebuah agenda demokrasi elektoral yang digelar rutin sekali dalam lima tahun, maka pelaksanaannya harus dibentuk dalam Undang-Undang. Untuk pemilu yang digelar serentak 2019 maka menggunakan UU No. 7 Tahun 2017. Pemilu sudah mengalami kodifikasi. Pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) yang telah dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu adalah produk peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi (dikitabkan) itu. Yang pada mulanya tersebar ke pelbagai peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu serentak 2019 lalu, disatukan ke dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sering disebut juga dengan pemilu serentak lima kotak.²⁷

Jadi, pemilu serentak pertama kalinya dilakukan pada tahun 2019 dikarenakan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum yang mulanya terbagi ke dalam tiga Produk Undang-Undang yang kemudian dikodifikasikan atau dikitabkan ke dalam satu produk Undang-Undang, yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁷ Zennis Helen, *Problematisa Pembentukan Regulasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Serentak yang Demokratis*, Jurnal Ensiklopedia Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 209-210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rancangan undang-undang Pemilu disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017 dinihari dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-undang ini terdiri atas 573 Pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam Undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁸

Jadi, setelah disetujui di Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 dini hari. Pada tanggal 15 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang berisi tentang produk Pemilihan Umum (Pemilu). Yang mana Undang-Undang tersebut berisi 573 Pasal dan 4 lampiran. Serta juga di dalam Undang-Undang tersebut menitikberatkan tentang Pemilu yang diadakan harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Juga pemilu harus diselenggarakan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan UU No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inipun mengacu kepada UU *a quo*, yakni melalui proses pembahasan di DPR bersama dengan

²⁸ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-1, hlm. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah yang sebelumnya telah dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017, dan kemudian dibahas dengan DPR.²⁹

Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ialah bahwa UU tersebut proses pembentukannya diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara bertahap di mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai tahap terakhir pengundangan. Yang juga melalui proses pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional 2017.

B. Undang-Undang Pemilu di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden merupakan langkah awal dari suatu investasi politik jangka panjang bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia untuk membangun kebiasaan memilih calon pemimpinnya dengan cara demokratis. Suatu proses pembelajaran politik ke depan bagi bangsa Indonesia.

Kebijakan pemilihan presiden secara langsung tegas pada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 6A ayat (1).³⁰

Sebagai pelaksanaan ketentuan dari UUD tersebut telah diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

²⁹ Zennis Helen, *op.cit.*, hlm. 211

³⁰ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 42 Tahun 2008.³¹ Tepatnya ditetapkan pada tanggal 13 November 2008 dan diundangkan pada tanggal 14 November 2008.

Mekanisme pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif secara serentak dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah merupakan bentuk pelurusan tafsir keliru dari pembuat undang-undang terhadap prinsip demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurut pembuat undang-undang, prinsip demokrasi tidak akan terlanggar dengan diaturnya mekanisme pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilu Legislatif sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya beralasan bahwa dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktu yang disebutkan yaitu lima tahunan dan berdasarkan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Undang-Undang, yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga penentuan sistem sepenuhnya akan menjadi kebijaksanaan pembuat undang-undang. Atas dasar itu, pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilu Legislatif.

³¹ I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan, 2014, hlm. 557

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ialah pelaksanaan ketentuan dari UUD NRI Tahun 1945 yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian di revisi kembali pada tanggal 13 November 2008 yang kemudian disahkan pada 14 November 2008. Yang mana pemilihannya akan diadakan setiap kurun lima tahun sekali setelah diadakannya Pemilu Legislatif.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang ini ditetapkan dan diberlakukan tanggal 16 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan salah satu peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Sebagai proses demokrasi, besar, harapan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Sebagai proses demokrasi, besar harapan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas adalah dengan adanya penyelenggaraan pemilu.³²

Jadi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ialah salah satu acuan dalam

³² Nikmah Isnaini, Skripsi, *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2018, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemilihan umum pada 2014. Lalu, terbentuknya Undang-Undang ini supaya proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sehingga terwujud pemilu yang baik dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan walaupun dibatasi oleh jabatan tertentu. Sifat mandiri menunjukkan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.³³

Jadi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasionalnya ialah mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetapnya ialah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan walaupun dibatasi jabatan tertentu.

³³ Vera Agus Indriyani, Skripsi, *Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu, sifat mandiri ialah bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.³⁴

Jadi, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum KPU harus berpedoman kepada 12 asas tersebut. Supaya terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas.

³⁴ Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diundangkan tanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilu sebelumnya, yakni UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Jadi, undang-undang ini ditetapkan dan diberlakukan pada 11 Mei 2012. Yang mana menurut undang-undang ini pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdiri dari 25 (dua puluh lima) bab yang terdiri dari 328 (tiga ratus dua puluh delapan) pasal. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

³⁵ Tomita Juniarti Sitompul dan Marlina, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jurnal Metacoria, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 164

³⁶ Cut Nurita dan Muhammad Ridwan Lubis, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Utara*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anggota DPR, DPD, dan DPRD menambahkan bab baru yang dalam undang-undang sebelumnya hanya merupakan pasal atau bagian dari suatu atau beberapa bab atau karena beberapa ketentuan telah diatur dalam perundang-undangan lain.³⁷

C. Isi Pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jika dilihat dari konsiderannya ada beberapa alasan dibuatnya undang-undang ini. Pertama, untuk mencapai tujuan negara. Kedua, untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang ini dibuat guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Keempat, untuk menjamin pengaturana sistem pemilihan umum. Kelima, untuk menciptakan pemilihan umum yang efisien dan efektif.

Adapun kandungan dari UU ini memuat tentang pelaksanaan pemilu legislatif. Ada beberapa isi yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilihan legislatif di buku ketiga pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 168 ayat (2) berbunyi, “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional daftar terbuka”.
- b. Pasal 172 berbunyi, “Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”.³⁸

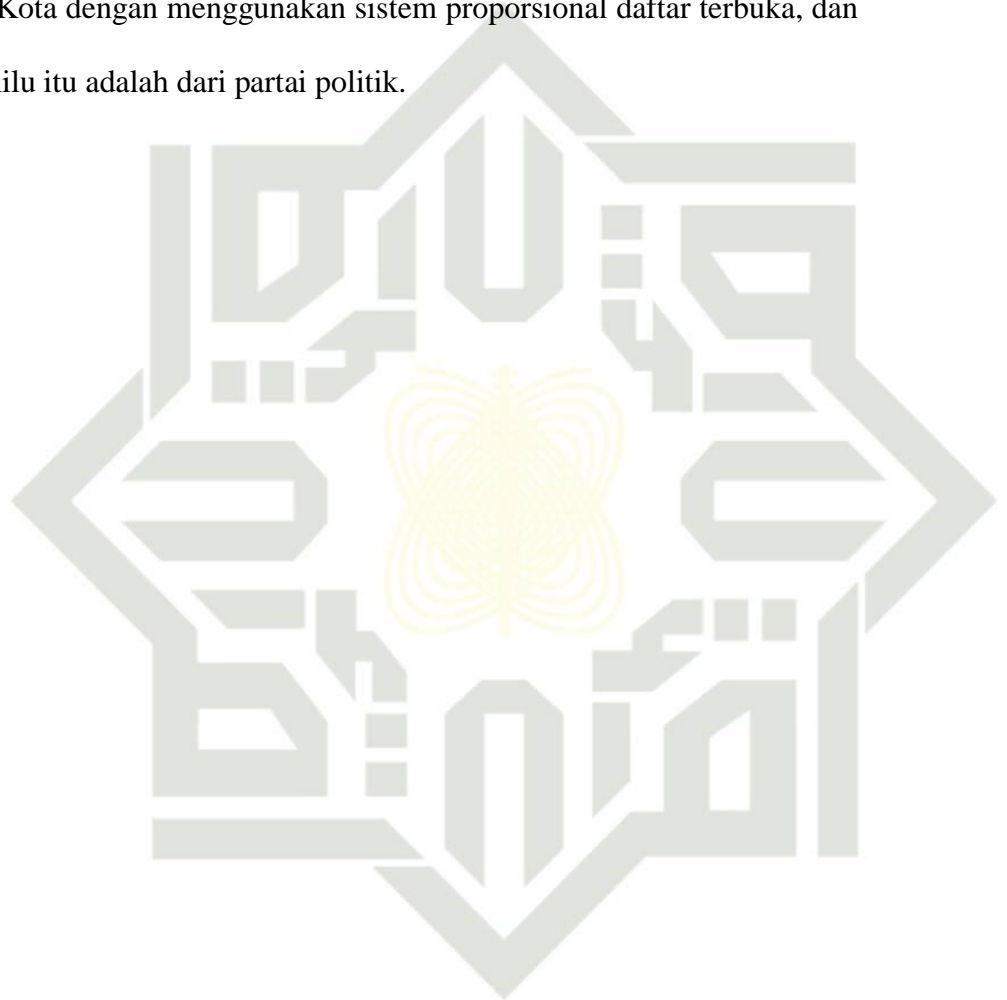
³⁷ Tomita Juniarti dan Marlina, *op.cit*, hlm. 164

³⁸ Dean Antono Putra, *Pelaksanaan Sistem Pemilu Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan, 2020, hlm 13-14

Jadi, isi pokok yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ialah memuat tentang pelaksanaan pemilu legislatif. Juga, disebutkan di dalam Pasal 168 ayat (2) dijelaskan juga bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, dan peserta pemilu itu adalah dari partai politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Pemilu Proporsional Terbuka

1. Pengertian Pemilu Secara Teori

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan.³⁹ Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.

2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli

a. Ramlan Surbakti

Pemilu oleh Ramlan Subakti disebut sebagai “instrumen”. Instrumen berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

³⁹ Syahril Syahbani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), cet. ke-2, hlm. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi oleh Ramlan Surbakti ini sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.

b. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum (*general election*).⁴⁰

Dari beberapa pengertian pemilu di atas tadi dapat kita simpulkan arti dari pemilu ialah alat atau cara untuk menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Yang mana wakil-wakil yang dipilih tersebut diharapkan dapat untuk mewujudkan

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) cet. ke-1, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Oleh karena itu, perlu penyeleksian terhadap wakil-wakil yang dipilih sehingga mendapatkan wakil-wakil yang dapat dipercayai.

Pemilu di dalam Islam pun sebenarnya dibolehkan dalam Islam. Sebab, kekuasaan itu ada di tangan umat. Ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Prinsip ini terlaksana melalui baiat dari pihak umat kepada seseorang untuk menjadi khalifah.⁴¹ Dengan kata lain, seseorang tidak akan menjadi pemimpin, kecuali atas dasar pemilihan oleh umat. Salah satu cara memilih bagi umat ialah pemilu tersebut untuk memilih siapa yang mereka kehendaki menjadi pemimpin.

Istilah baiat berasal dari kata *bai'at* yang berarti menjual. Baiat, mengandung makna perjanjian; janji setia, atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan baiat selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. Maka istilah baiat secara istilah adalah ungkapan perjanjian apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.⁴²

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Suyuthi Pulungan, baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang yang berbaiat menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara (amir)

⁴¹ J. Suyuthi Pulungan, *op. cit.*, hlm. 72

⁴² *Ibid.*, hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemimpinnya dalam melaksanakan urusannya dan semua urusan kaum muslimin.⁴³

Sejarahinya, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak sembilan kali.⁴⁴ Pemilu pertama sejak kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa pemerintahan parlementer untuk memilih anggota DPR dan Badan Konstituante. Puluhan partai politik telah mengikuti pemilu, namun terdapat empat partai besar yang hampir menguasai kursi yang seimbang, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut telah melambangkan masyarakat plural Indonesia dengan penampilan ideologi yang bertentangan, sehingga proses menemukan kesepakatan dalam Badan Konstituante mengalami kegagalan, dan akhirnya hasil pemilu yang dianggap paling bersih dan jujur serta demokratis kurang mampu menghasilkan keputusan di Konstituante.

Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia tidak melaksanakan pemilu, barulah pada masa demokrasi Pancasila orde baru tahun 1971 dilaksanakan pemilu kembali dengan peserta 10 Orsospol, Golkar mendapat mayoritas mutlak. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar (perwakilan berimbang dengan stelsel daftar). Pemilu orde baru tidak semua anggota DPR dipilih, sebagian diangkat ABRI dan Non-ABRI, namun setelah asas tunggal Pancasila

⁴³ *Ibid.*, hlm. 74

⁴⁴ Yuliani Widianingsih, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*, Jurnal Signal, Vol. 5, No. 2, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan, hanya dari golongan ABRI saja yang diangkat, yaitu seperlima dari jumlah anggota DPR. Pemilu masa orde baru tidak berjalan secara kompetitif, karena pemerintah berkeinginan stabilitas politik dengan dukungan mayoritas DPR/MPR. Untuk itu, Golkar harus dimenangkan dengan pelbagai cara dalam setiap kali pemilihan umum.⁴⁵

Dalam hal pelaksanaan pemilu, pemerintah orde baru menyatakan bahwa tujuan pemilu pada praktiknya adalah untuk mempertahankan rezim status *quo*, sehingga pemilu memiliki makna: (1) legitimasi terhadap kepemimpinan orde baru di bawah pimpinan Soeharto, (2) pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan keuntungan kepada Golkar, seperti tidak menerima asas jurdil, dan hari “H” tidak libur sehingga birokrasi digiring masuk Golkar, dan (3) pada hasil pemilu protes PPP dan PDI dapat diredam, pemilu memiliki indikasi kecurangan yang sangat mendalam sebagai usaha pembenaran konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁶

Wacana politik akhir tahun 1990-an menuntut ke arah perubahan perubahan sistem pemilu dengan mengemukakan empat preposisi (Eep Saefullah Fatah, 1997: 27), yaitu sebagai berikut.⁴⁷

1. Sistem pemilu proporsional telah melahirkan legislatif yang berjarak dengan rakyat, jika sistem proporsional diganti dengan sistem distrik, maka akan lahir legislatif yang lebih dekat dengan rakyat.

⁴⁵ Syahril Syahbani, dkk, *op. cit.*, hlm. 144-145

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 147

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem pemilu proporsional mengorientasikan para anggota legislatif menjadi wakil partai, sistem distrik akan mengorientasikan para anggota legislatif menjadi wakil rakyat.
3. Perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik akan melahirkan legislatif masa depan yang kuat dan fungsional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol eksekutif.
4. Atas dasar pertimbangan itu, maka perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik dianggap merupakan sebuah jalan perubahan politik secara demokratisasi.

Namun setelah reformasi bergulir tahun 1998, ada kecenderungan perpolitikan Indonesia tidak mau mengubah sistem pemilu ke distrik, hal tersebut wajar, karena akan banyak tokoh politik karbitan yang kualitasnya dipertanyakan akan tersingkir saat pemilu. Elite-elite politik yang oportunis tampak lebih cenderung mendukung sistem proporsional, keinginan ini telah diterima pada pemilu tahun 2004. Inilah dilemma politik Indonesia ke arah demokratisasi, yang mana kurang didukung oleh kualitas insan politik yang otonom, rasional, dan transparansi.⁴⁸

Jadi, dapat kita simpulkan awal bahwa pemilu pertama kali di Indonesia di mulai pada tahun 1955. Namun pada masa demokrasi terpimpin Indonesia tidak melaksanakan pemilu, dan kembali dilaksanakan pada masa orde baru pada tahun 1971 dengan peserta 10 Orsospol yang mana suara terbanyak diperoleh oleh Golkar.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah tahun 1998, ada kecenderungan elite politik Indonesia tidak ingin mengubah sistem pemilu yang proporsional ke distrik. Karena para elite politik takut jika jika sistem diubah maka para tokoh politik yang kemampuannya masih dipertanyakan akan tersingkir disaat pemilu. Sehingga pada tahun 2004 keinginan tersebut diterima, sehingga menjadi dilema politik Indonesia. Karena politik Indonesia menjadi kurang didukung oleh kualitas insan politik yang otonom, rasional, dan transparansi.

3. Pengertian Pemilu Proporsional Terbuka

Indonesia mempunyai dua sistem pemilu, yakni sistem Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional adalah *open list* (sistem daftar terbuka). Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi calon yang dikehendaknya.⁴⁹ Sistem proporsional (*proportionate representative*) diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional representatif terdiri dari dua macam, yaitu *list* yaitu berdasarkan daftar; dan *single tranferable votes* yaitu berdasarkan peringkat. Umumnya Sistem Proporsional Daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan.

Di Indonesia, jumlah minimal kursi dalam satu daerah pemilihan adalah tiga kursi. *List* memiliki tiga pola, yaitu daftar tertutup atau *close*

⁴⁹ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Europa, 2006), cet. ke-1, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

list, daftar terbuka atau *open list* dan daftar bebas atau *free list* (Reynold, 2005). Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut,⁵⁰ dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.⁵¹ Sedangkan sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal atas dasar prularitas (suara terbanyak).⁵²

Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.⁵³

Sistem Proporsional Daftar Terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012., yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal ayat (1) yang

⁵⁰ Diah Ayu Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 20

⁵¹ Sri Emut Ratnasara, *op. cit.*, hlm. 14

⁵² Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. ke-1, hlm. 265

⁵³ Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, (Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998), cet. ke-1, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen.⁵⁴

Jadi, menurut UU No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu daftar terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai.

4. Tujuan Pemilu

Dalam ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara

⁵⁴ Diah Ayu Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan pemerintahan, menurut *Maurice Duverger* diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan (*chief de l'Etat*), dan sebagainya.⁵⁵

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang eksekutif maupun legislatif.⁵⁶

⁵⁵ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia (dasar-dasarnya)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), cet. ke-1, hlm. 16-17

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) cet. ke-1, hlm. 170-171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi tujuan dari pemilihan umum ialah antara lain untuk pengisian jabatan wakil-wakil rakyat di dalam suatu negara yang demokratis. Juga pentingnya pemilihan umum disebabkan aspirasi rakyat yang kemungkinan berubah dari waktu ke waktu mengenai kebijakan negara. Lalu kehidupan bersama juga dapat berubah karena banyak faktor. Kemudian perubahan aspirasi dan pendapat rakyat bisa juga terjadi karena pemilih baru mempunyai sikap berlawanan dengan orang tua mereka sendiri. Serta tujuan yang paling penting, pemilihan umum diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara.

5. Fungsi Pemilu

a. Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. *pertama*, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. *Kedua*, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. *Ketiga*, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh dari hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.⁵⁷

b. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.⁵⁸

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Topik bahasan ini terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan siyasah. Supaya diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah, maka perlu dijelaskan dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁵⁹

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), cet. ke-5, hlm. 68

⁵⁸ TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003), cet. ke-2, hlm. 96

⁵⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) cet. ke-5, hlm. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum sesuai syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum dalam agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid-mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.⁶⁰

Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-'Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶¹ Jadi, *siyasah* adalah cara mengatur suatu kepemimpinan dengan cara yang membawa kemaslahatan bagi semua.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 22-23

⁶¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal al-Imamah, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraiannya, dapat pula kita simpulkan bahwa fiqih siyasah adalah ilmu yang tentang segala urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, aturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa yang dibuat sesuai dengan ajaran syariat demi terwujudnya pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semua.

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁶² yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”⁶³ Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, diterjemahkan Adnan Zainuddin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), cet. ke-1, hlm. 54

⁶³ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), cet. ke-3, hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”⁶⁴

Jadi, *dusturiyah* yaitu bisa kita artikan sebagai kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama dalam suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Atau dalam arti lain yaitu sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁵

Jadi, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Seperti undang-undang dasar negara, sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara, lalu bagaimana perumusan undang-undang tersebut. Selain itu, kajian fiqh siyasah dusturiyah juga membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 52

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prentice Media Group, 2014), cet. ke-1, hlm. 178

3. Pengertian *Syura*'

Kata *syura*' berasal dari kata *syawara* – *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan menggambarkan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.⁶⁶ Jadi, *syura*' ialah saling menjelaskan atau mengajukan sesuatu dan mengambil sesuatu. Dengan kata lain, *syura*' adalah saling bertukar dan meminta pendapat dari satu sama lain di dalam suatu perundingan.

Kata *syura*' dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan suara. Dari sini, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah *syara al-a'sal* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.⁶⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *syura*' adalah mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki argumentasi yang baik dan mempunyai keputusan yang tegas untuk menjaring ide-ide terbaik, tetapi bukan dari hasil suara mayoritas

⁶⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. ke-1, hlm. 18

⁶⁷ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet. ke-1, hlm. 139-140

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lewat keputusan pemungutan suara. Dengan kata lain, keputusan yang diambil ialah keputusan yang bisa berdampak baik untuk semua orang yang, bukan hanya berdampak baik untuk sebagian orang. Oleh karena itu, yang dicari adalah keputusan terbaik bukan keputusan mayoritas.

4. Pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi*

Istilah *ahlul halli wal aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun*, dan *aqdun*. Dalam kamus bahasa Arab kata “*ahl*” mempunyai arti ahli atau keluarga.⁶⁸ Sedangkan kata “*hallu*” berarti membuka atau menguraikan,⁶⁹ sedangkan “*aqd*” berarti kesepakatan/mengikat.⁷⁰ Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁷¹ Jadi dapat kita simpulkan dari uraian di atas bahwa *ahlul halli wal aqdi* ialah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menguraikan suatu pendapat yang bersifat mengikat.

Istilah *ahlul halli wal aqdi* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan dengan *al-Shahabah*.⁷² Jadi, istilah *ahlul halli wal aqdi* tersebut tidak muncul di masa Rasulullah saw. melainkan istilah tersebut muncul di kalangan para ahli tafsir dan ahli fikih di masa Rasulullah saw. yang mana orang-orang tersebut dinamakan dengan *al-*

⁶⁸ Mahmud Yunus, *Qamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), cet. ke-1, hlm. 53

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 106

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 257

⁷¹ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 66

⁷² Farid Abdul Kholid, *op.cit.*, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shabahah. Ahlul halli wal aqdi (ahlul ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalannya musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.⁷³ Jadi *ahlul halli wal aqdi* ialah sekelompok orang yang telah dipilih oleh rakyat yang diberi tugas atau kewenangan oleh rakyat untuk memilih pemimpin lewat jalan bermusyawarah, kemudia setelah didapatkan orang-orang yang dirasa memiliki kekuatan untuk memimpin mereka kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiatkan oleh rakyat untuk dijadikan pemimpin.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 108

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya ialah adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemilu proporsional terbuka itu ialah sistem pemilihan yang mana wakil terpilih di dalam pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ialah yang memperoleh suara terbanyak di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara, bukan berdasarkan pada nomor urut partai pemilihan tersebut. Yang mana hal tersebut dinyatakan secara implisit ditegaskan di dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Lalu secara eksplisit juga ditegaskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 pada huruf (f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b).
2. Sebagai sebuah sistem pemilu proporsional terbuka juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya sistem pemilu terbuka setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, sehingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirim wakilnya di parlemen. Akan tetapi, dengan banyaknya partai yang bersaing tetap saja akhirnya ada kesulitan bagi setiap partai untuk menjadi partai mayoritas di suatu daerah pemilihan.
3. Sistem pemilu proporsional terbuka yang dipakai di Indonesia ialah sistem yang menerapkan calon yang memiliki suara terbanyak pada pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Bukan pemilihan yang berdasarkan nomor urut partai. Sistem ini dipakai supaya rakyat lebih mengenal siapa yang akan menjadi wakilnya untuk menyuarakan aspirasinya di pemerintahan. Dalam siyasah dusturiyah, untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut diadakan dengan jalan *syura*’ atau musyawarah. Yang mana nanti dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan berfikir lebih baik dari yang lainnya untuk dijadikan sebagai wakil rakyat yang pada zaman para sahabat dulu disebut dengan istilah *ahlul halli wal aqdi*. Kemudian nanti orang-orang inilah yang akan berkewajiban untuk menyampaikan setiap keinginan rakyat ke pemerintahan dan begitupun sebaliknya. Ketika kepemimpinan sedang kosong, maka mereka yang akan memilih beberapa orang yang layak untuk dijadikan pemimpin. Setelah mereka menemukannya, maka mereka akan mengumumkan kepada rakyat untuk melakukan bai’at kepada orang tersebut untuk dijadikan pemimpin.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

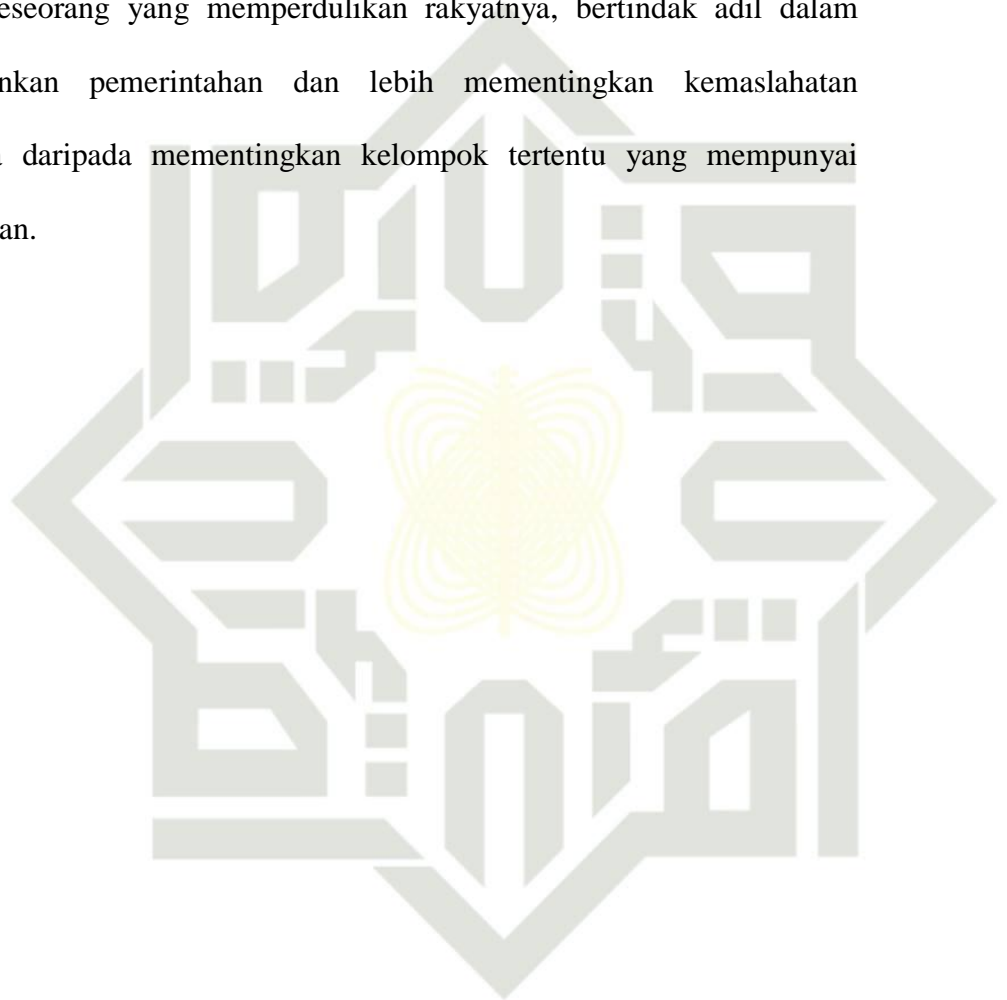
1. Pemerintah menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak yang tercantum pada surat suara di daerah pemilihan tersebut.
2. Pemerintahan hendaknya memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan mekanisme Undang-Undang tetapi dengan tidak menyalahkan ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diatur oleh agama. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya seorang yang berhak di daulat untuk mewakili seluruh rakyat.

3. Pemerintah kedepannya lebih bijak dalam menyelenggarakan pemilu. Supaya wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan pemerintahan benar-benar seseorang yang memperdulikan rakyatnya, bertindak adil dalam menjalankan pemerintahan dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama daripada mementingkan kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press. 2000. Cet. ke-1
- Asshiddie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2017. Cet. ke-9
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. Cet. ke-1
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. *Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: Quranidea. 2007. Cet. ke-1
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. Cet. ke-2
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007. Cet. ke-7
- Djazuli, A. H. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003. Cet. ke-2
- Fahruroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 4. 2008
- Firdausy, Kharisma Aulia. *Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas pada Pemilu Legislatif di Kota Salatiga*. *Jurnal Res Publica*. Vol. 3. 2019
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999. Cet. ke-1
- Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990. Cet. ke-1
- Helen, Zennis. *Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Serentak yang Demokratis*. *Jurnal Ensiklopedia*. Vol. 2. 2020
- Indriyani, Vera Agus. *Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektf Fiqih Siyasah*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isnaini, Nikmah. *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014. Cet. ke-1
- Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits. Jurnal al-Imarah. Vol. 3*. 2018
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: prenadamedia Group. 2018. Cet. ke-1
- Karim, Khalil Abdul. *Syari'ah: Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*. Yogyakarta: LKIS. 2003. Cet. ke-1
- Karyati, Sri. *Sistem Pemilu Terbuka dan Masa Depan Pemilu 2019. Jurnal Unizar Law Revie. Vol. 1*. 2018
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Terjemahan: Zainuddin, Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994. Cet. ke-1
- Khalid, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah. 2005. Cet. ke-1
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1981. Cet. ke-4
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*. Jakarta: Gramedia Widiaswara. 1998. Cet. ke-1
- Mhammad Abduh Tuasikal, *Faedah Sirah Nabi: Bai'at Aqabah Pertama*, Artikel diakses pada 19 Juli 2019 dari <https://rumaysho.com/20900-faedah-sirah-nabi-baiat-aqabah-pertama.html>
- Nurita, Cut dan Muhammad Ridwan Lubis. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 1*. 2019
- Pratiwi, D. A. *Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?.* Jurnal Trias Politika. Vol. 2. 2018
- Prayuda, Yendri. *Pemilihan Umum di Indonesia: Pemimpin dan Wakil Rakyat yang Ideal. Jurnal Kemuning. Vol. 1*. 2020
- Puungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1994. Cet. ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Puungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002. Cet. ke-5
- Putra, Dean Antono. *Pelaksanaan Sistem Pemilu Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: IAIN Padangsidempuan. 2020
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2017. Cet. ke-1
- Raawijaya, Usep. *Hukum Tata negara Indonesia (dasar-dasarnya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983. Cet. ke- 1
- Ranasara, Emut Sri. “*Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*”. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Harumnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press. 2014. Cet. ke-1
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Cet. ke-1
- Sitompul, Tomita Juniarti dan Marlina. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jurnal Mertacoria. Vol. 7. 2014*
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. Cet. ke-5
- Sunhari. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI*. Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2009
- Syhabani, Syahrial. dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2013. Cet. ke-2
- Tamihyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti. 1995. Cet. ke-1
- Ti ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewarganegaran (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta. 2003. Cet. ke-2
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Widiansih, Yuliani. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*. Jurnal Signal. Vol. 2. 2017
- Wijaya, I Dewa Made Putra. *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. 2014
- Yusuf, Muhammad. *Qamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973. Cet. ke-1
- Zamri, Ahmad Rizaldi. *Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah. 2019
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004. Cet. ke-1
- Zuchdi, Darmiyanti dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019. Cet. ke-1
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian: Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007. Cet. ke-2



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ASNAN ASY'ARI
NIM : 11724101007
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ASNAN ASY'ARI
NIM : 11274101007
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
 DUSTURIYAH

Pembimbing : Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Cipta D Lindungi Undang-Undang

k cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/8341/2021

Pekanbaru,10 September 2021

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:ASNAN ASY'ARI
NIM	:11724101007
Jurusan	:Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:IX (Sembilan)
Lokasi	:Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43619
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/8341/2021 Tanggal 10 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

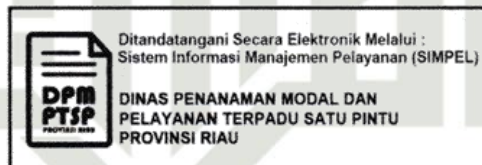
1. Nama	:	ASNAN ASY'ARI
2. NIM / KTP	:	11724101007
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
7. Lokasi Penelitian	:	PERPUSTAKAAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 September 2021



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Asnan Asy'ari adalah putra dari pasangan suami istri A.Rasul. BR dan Salmiah, dan juga sebagai anak ke- 3 dari 3 bersaudara Masri Syukur, Armi Sabri dan Asnan Asy'ari, lahir pada tanggal 31, Januari 2000 di Sungai Mendung, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu, Riau.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah sekolah Dasar di SDN 022 Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu, kemudian penulis

melanjutkan studinya di MTs Thamrin Yahya, Rambah Hilir. Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas tetap di MAN 1 Rambah Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari bapak Hendri Sayuti, M. Ag dan dosen-dosen PHT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”** Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.